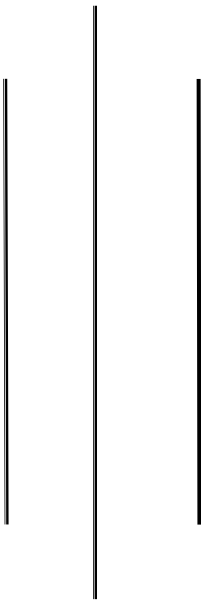




**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN**  
**PENGEMBANGAN DAERAH**

**(LKIP)**  
**Tahun 2017**



**BAPPEDA KOTA BANJARBARU**  
**TAHUN 2018**



DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI .....	
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1.</b>
1.1 Latar Belakang .....	1.
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi .....	1.
1.3 Struktur Organisasi .....	2.
1.4 Isu Strategis .....	7.
1.5 Sistematika Penyusunan .....	8.
<b>BAB II    PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>9.</b>
1.1 Rencana Strategis .....	9.
1.2 Perjanjian Kinerja .....	11.
<b>BAB III    AKUNTABILITAS .....</b>	<b>14.</b>
3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Th.2017 .....	14.
3.2 Akuntabilitas Keuangan .....	19.
<b>BAB IV    PENUTUP .....</b>	<b>23.</b>
1. Kesimpulan .....	23.
2. Saran .....	23.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah untuk mencapai tujuan diawali dengan adanya perencanaan. Sebagai unit perencana di daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Banjarbaru berupaya melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan. Berbagai program yang dilaksanakan TA 2017 dijabarkan dalam kegiatan dan indikator kegiatan (input, output, outcome) yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan yang sinergis, partisipatif dan akuntabel.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan maka dilakukan proses penilaian (akuntabilitas) kinerja instansi pemerintah selama TA 2017 sebagai unsur penyelenggara tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis.

Memperhatikan hal tersebut diatas, Bappeda Kota Banjarbaru berusaha untuk mengedepankan isu strategis dan mencoba mengungkap dalam sebuah laporan. Adapun yang difokuskan dalam pembahasan laporan ini adalah penjabaran dari rencana strategis yang telah ditetapkan untuk Tahun 2016-2021. Dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lkj IP) serta sesuai Visi Bappeda Kota Banjarbaru yaitu “Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Inovatif, Partisipatif dan Berkelanjutan”, maka disusunlah dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kota Banjarbaru dengan tujuan untuk mengetahui keberhasilan dan kendala serta solusi yang akan dilaksanakan dalam mencapai tujuan organisasi.

### 1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagai bagian dari Organisasi Pemerintah Kota Banjarbaru, Bappeda merupakan badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota dan mempunyai tugas untuk membantu Walikota dalam pelaksanaan fungsi penunjang Urusan Pemerintah dalam bidang perencanaan. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah. Berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 58 tahun 2016, Bappeda mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan, dan penelitian dan pengembangan;
- b. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan;



- c. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam bidang perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 1.3. Struktur Organisasi

#### 1.3.1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru, serta Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

##### 1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan tugas badan yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pengembangan dan pengendalian fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan.

Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Perumusan, penyusunan, koordinasi, sinkronisasi dan validasi kebijakan bidang penelitian dan pengembangan;
- c. Perumusan, penyusunan, koordinasi, sinkronisasi dan validasi kebijakan bidang fisik prasarana;
- d. Perumusan, penyusunan, koordinasi, sinkronisasi dan validasi kebijakan bidang ekonomi dan sosial budaya;
- e. Perumusan, penyusunan, koordinasi, sinkronisasi dan validasi kebijakan bidang penyusunan program dan evaluasi; dan
- f. Pengelolaan urusan kesekretariatan.

## 2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penyusunan program keuangan, umum dan

kepegawaian. Bagian sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Perencanaan
- c. Sub Bagian Keuangan

Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program di bidang perencanaan dan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- b. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, administrasi perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## 3. Bidang Penyusunan Program dan Evaluasi

Bidang ini mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan, forum Satuan Kerja Perangkat Daerah, menyusun rencana pembangunan, kebijakan umum anggaran serta prioritas plafon anggaran sementara, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Penyusunan Program.
- b. Sub Bidang Evaluasi.

## 4. Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya mempunyai tugas pokok melaksanakan teknis koordinasi kegiatan perencanaan pengembangan dalam bidang perekonomian dan sosial budaya.

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya terdiri dari:

- a. Sub Bidang Ekonomi.
- b. Sub Bidang Sosial Budaya.

## 5. Bidang Fisik Prasarana

Bidang ini mempunyai tugas pokok melaksanakan teknis pengkoordinasian, fasilitasi fisik prasarana sesuai ketentuan yang berlaku.

Bidang Fisik Prasarana terdiri dari :

- a. Sub Bidang Permukiman dan Lingkungan Hidup.
- b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Air.

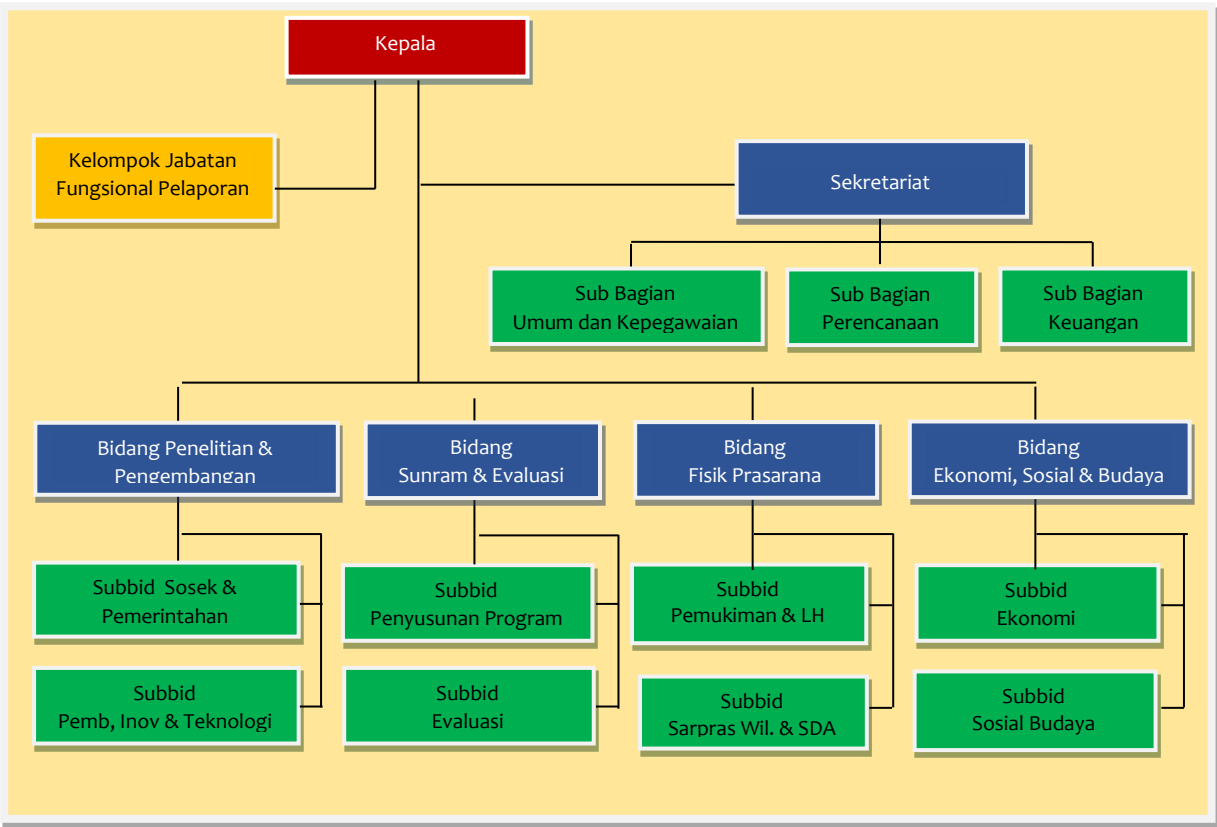
6. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang ini mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasa, pengoperasian dan Evaluasi kebijakan serta administrasi dan manajemen kelitbangan, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan.
- b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Inovasi dan Teknologi.

Gambaran Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru sebagai berikut:

Gambar 1.1  
Struktur organisasi Bappeda



1.3.2 Susunan Kepegawaian

Keadaan pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1.1  
Keadaan Pegawai Sesuai Eselon dan Golongan

No	Pendidikan	Jumlah		Golongan	Jumlah		Eselon	Jumlah	
		Lk	Pr		Pr	Lk		Pr	Lk
1	SD	-	-	II/c	-	1	IV/a	4	7
2	SLTP	-	-	II/d	-	1	III/b	3	1
3	SLTA	1	2	III/a	1	4	III/a	2	-
4	D-I	-	-	III/b	8	6	II/b	1	-
5	D-II	-	-	III/d	2	6			
6	D-III	-	1	IV/a	2	1			
7	D-IV	-	-	IV/b	3	1			
8	S-1	9	13	IV/c	2	-			
9	S-2	9	4	IV/d	1	-			
	Jumlah	19	20	Jumlah	19	20	Jumlah	9	8

Sumber : Data diolah, Bappeda Tahun 2017

Menurut jenjang pendidikan pegawai Bappeda Kota Banjarbaru dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2  
Pegawai Bappeda Sesuai Jenjang Pendidikan

Jumlah Pegawai ( PNS ) menurut Jenjang Pendidikan									
SD	SLTP	SLTA	DI	DIII	DIV	S1	S2	S3	Jumlah
-	-	3	-	1	-	22	11	-	37
Jumlah Pegawai (PTT/TK) menurut Jenjang Pendidikan									
SD	SLTP	SLTA	DI	DIII	DIV	S1	S2	S3	Jumlah
-	-	4	-	2	-	10	-	-	16

Sumber : Data diolah, Bappeda Tahun 2017

Pegawai Bappeda Kota Banjarbaru di tahun 2017 sebanyak 53 orang yang terdiri atas 37 orang PNS dan 16 orang Tenaga Kontrak, dengan daftar pegawai dan jabatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.3  
Daftar Pegawai sesuai Jabatan

No	Uraian	Nama Jabatan	Nama Pejabat
1.	Kepala	Kepala Bappeda	-
2.	Sekretariat	Sekretaris	Kanafi, S.IP, MM
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Liliana Ningrati, SE
		Pengadministrasian Umum	Yulia Kurniati, S.Pt
		Pengadministrasian Kepegawaian	Fahmi, S.H.I





No	Uraian	Nama Jabatan	Nama Pejabat
		Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	Fakhrizal Rusadi, S.Kom, MM
		Pengelola Sarana dan Prasarana Aparatur	Salmiah, SE
		Pengadministrasi Umum	Hj. Afrian Miftaquel Hudyawati, SH
		Pramu Bakti	Ade Fithri Sabar, S.Pi
		Pengadministrasi Persuratan	M. Zainal Alamsyah, SE
		Pengadministrasi Kepegawaian	Muhammad Ramadhana Wanadhie
		Pramu Bakti	Junita Akhrina
		Kepala Sub Bagian Perencanaan	Maureen Rizqi Ramadhany, SE
		Pengelola Bahan Perencana	Arief Rahman Hakim, SE
		Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Meridha Marikh, SE
		Kepala Sub Bagian Keuangan	Rahmi Fahrina, SE, MM
		Verifikator Keuangan	Hj. Mun'imah
		Bendahara	Khalid Fitri, SE
		Pengelola Gaji	Fitriyani, SE
		Yennita Alfadina, A.Md	Pengadministrasian Keuangan
3.	Bidang Penyusunan Program dan Evaluasi	Kepala Bidang Penyusunan Program dan Evaluasi	Abdussamad, ST, MT
		Kepala Sub Bidang Penyusunan Program	Maulana, SE.,MM
		Pengolah Data Perencanaan Penganggaran	Dony Fajar Saputra, S.STP
		Pengelola Pelaksanaan Program dan Anggaran	Julius Heryadi, SE
		Pengolah Data Perencanaan Penganggaran	Fajrin Novrizaldy, S.M,B
		Kepala Sub Bidang Evaluasi	Muhammad Aprian Noor.,S.Hut
		Analisis Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	Noor Rafikah, SE
		Pengolah Data Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	Riza Sovia Nur Priandhita, S.S
		Pengelola Monitoring dan Evaluasi	Noor Effendi, S.AP
		Pengolah Data Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	Alpi Hairin
4.	Bidang Fisik dan Prasarana	Kepala Bidang Fisik dan Prasarana	Akhmad Syahidan, S.Pi.,M.Ec.Dev
		Kepala Sub Bidang Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Rina Setyati, S.Si.,M.PA
		Kepala Sub Bidang Sarana Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Air	Eryek Triandoko, SP.,MS
		Pengelola Sumber Daya Air	Herry Fuziyanto, A.Md
		Penelaah Laik Fungsi Prasarana Fisik	Siti Mariana, ST
		Fikri Rizky Ilhami, A.Md	Pengelola Informasi Lingkungan
5.	Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya	Kepala Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya	Hj. Elda Rusmiladewi, S.Hut.,MT.,MA
		Kepala Sub Bidang Sosial Budaya	Bambang Supriyadi, SE.,ME
		Analisis Sosial Budaya	H. Agus Firdaus



No	Uraian	Nama Jabatan	Nama Pejabat
		Penngadministrasi Umum	Qory Suriadi Puteri, SE
		Pengolah Data Sosial Budaya	Yammatso Gondo
		Kepala Sub Bidang Ekonomi	Isnani Zain, SP
		Analisis Perekonomian	Resita Galis Rositaria, S.AB
		Pengolah Data Ekonomi	Doddy Kurniawan, S.IP
6.	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Ir.Muhammad Barzani
		Kepala Sub Bidang Sosial Ekonomi dan Pemerintahan	Hairina Yulianti, S.Sos
		Pengelola Rencana Penelitian Pengembangan	Annisa Chairuswa Nurfaulin, S.I.Kom
		Pengadministrasian, Evaluasi dan Kerjasama Penelitian	Astarini Dewi, SE
		Kepala Sub Bidang Pembangunan, Evaluasi dan Teknologi	Wulan Purwaningrum, ST.,M.AP
		Pengadministrasian, Evaluasi dan Kerjasama Penelitian	Mailia Yusantina
		Fungsional	Agus Yana, SP, M.Si

Sumber : Data diolah, Bappeda Tahun 2017

1.4. Isu Strategis

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Banjarbaru merupakan organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas membantu Walikota dalam pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.

Peran Bappeda sebagai penggerak pembangunan sangat strategis, karena bertanggung jawab atas terwujudnya perencanaan pembangunan yang handal sebagai pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan daerah. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menyebutkan bahwa terdapat 5 (lima) tujuan pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

- 1. Untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan
- 2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu dan antar fungsi pemerintah, serta antar pusat dan daerah.
- 3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
- 4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat
- 5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Adapun isu strategis yang akan ditangani oleh Bappeda pada periode tahun 2016-2021 adalah:

- 1. Mengoptimalkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.



- 2. Mengoptimalkan keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 3. Meningkatkan peran serta dan aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah
- 4. Meningkatkan Kualitas hasil kajian/penelitian untuk menjadi bahan kebijakan pembangunan
- 5. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia perencana

1.5. Sistematika Penyusunan

Berdasarkan Permen PAN nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Riview atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka sitematika penyusunan laporan kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.4**  
**Sistematika Penyusunan**

SISTEMATIKA PENYUSUNAN	
Kata Pengantar	
Ringkasan Ekslusif	
Daftar Isi	
Daftar Tabel	
Daftar Gambar	
BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang
1.2	Tugas Pokok dan Fungsi
1.3	Struktur Organisasi dan Kepegawaian
1.4	Aspek Strategis
1.5	Sistematika Penyusunan
BAB II	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1	Rencana Strategis
2.2	Perjanjian Kinerja
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
3.1	Capaian Kinerja Organisasi
3.2	Realisasi Anggaran
BAB IV	PENUTUP
4.1	Kesimpulan
4.2	Saran

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1. Rencana Strategis

##### 2.1.1. Visi Misi

Dalam rangka mendukung visi Kota Banjarbaru 2016-2021 untuk mewujudkan "Banjarbaru sebagai Kota Pelayanan yang Berkarakter", maka telah ditetapkan Visi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru sebagaimana termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappeda tahun 2016-2021 yaitu **"Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Inovatif, Partisipatif dan Berkelanjutan"**. Untuk mewujudkan visi tersebut, telah dirumuskan beberapa misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dan penguatan kelembagaan perencanaan.
2. Memantapkan penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah yang inovatif dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan data dan dokumen perencanaan sektoral dan kewilayahan.
4. Mewujudkan penelitian dan pengembangan yang akurat untuk mendukung kebijakan dan rencana pembangunan.

##### 2.1.2. Maksud dan Tujuan

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi, dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Berdasarkan visi dan misi Bappeda, maka dalam periode kerja tahun 2016-2021 Bappeda Kota Banjarbaru menetapkan 6 (enam) tujuan meliputi:

1. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Penelitian dan Pengembangan;
2. Meningkatkan Kualitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan;
3. Meningkatkan Kualitas Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan
4. Mewujudkan Perencanaan Ketersediaan Fisik Prasarana Yang Merata, Cerdas dan Berwawasan Lingkungan;
5. Meningkatkan Perencanaan Perekonomian Kreatif dan Kewirausahaan; dan
6. Meningkatkan Perencanaan Penanganan Sosial Budaya yang Terpadu.

Sasaran adalah target/hasil yang diharapkan dari suatu program dan keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Berdasarkan visi, misi dan tujuan Bappeda, maka dalam periode kerja tahun 2016-2021 Bappeda Kota Banjarbaru menetapkan 14 (empat belas) sasaran meliputi:

1. Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Penelitian dan Pengembangan;
2. Meningkatnya Tindak Lanjut Hasil Penelitian dan Pengembangan;
3. Meningkatnya Publikasi Data dan Informasi;
4. Meningkatnya Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan;
5. Terwujudnya Penyusunan Dokumen Perencanaan yang Tepat Waktu;
6. Meningkatnya Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran;
7. Terwujudnya Penyampaian Laporan Evaluasi yang Tepat Waktu;
8. Terlaksananya Keterpaduan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Fisik Prasarana;
9. Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Kawasan yang Cerdas dan Berwawasan Lingkungan;
10. Tersusunnya Dokumen Perencanaan Ruang yang Aplikatif;
11. Terlaksananya Keterpaduan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Perekonomian Kreatif dan Kewirausahaan;
12. Tersusunnya Desain Pengembangan Perekonomian yang Cerdas;
13. Meningkatnya Sinkronisasi Perencanaan Penanganan Sosial yang Komprehensif; dan
14. Terwujudnya Desain Pengembangan Budaya yang Berkarakter.

2.1.3.Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai melalui beberapa program dan kegiatan dan bagian integral dalam perencanaan strategis, sasaran strategis Bappeda Kota Banjarbaru dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1  
Sasaran dan Indikator Sasaran

No.	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Mewujudkan keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat keselarasan RKPD dengan RPJMD
		Tingkat keselarasan Renstra SKPD dengan RPJMD
		Tingkat keselarasan Renja SKPD dengan RKPD
2.	Terakomodirnya Aspirasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah	Persentase Pagu Belanja Langsung RKPD yang mengakomodir Usulan Musrenbang
3.	Meningkatnya Dok.Perencanaan Sektoral dan Kewilayahan yg memenuhi aspek kualitas pelaksanaan perencanaan	Prosentase Dokumen Perencanaan Sektoral dan Kewilayahan yang memenuhi aspek kualitas
4.	Meningkatnya Dokumen hasil kajian/penelitian untuk	Prosentase Kajian/Penelitian dan Pengembangan



	menjadi bahan kebijakan pembangunan	yang diaplikasikan pada kebijakan pemerintah Kota Banjarbaru
5.	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja SKPD	Prosentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti
		Nilai Evaluasi LAKIP

Sumber : Data diolah, Bappeda Tahun 2017

2.1.4.Strategi dan Arah Kebijakan

Sesuai sasaran dan tujuan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Bappeda Kota Banjarbaru dalam rangka mewujudkan keberhasilan Pembangunan Daerah diperlukan sebuah keselarasan perencanaan serta kebijakan pembangunan lainnya yang akan mendukung pencapaian tujuan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan daerah, maka arah kebijakan dan strategi yang akan dilakukan dalam periode 2016-2021 adalah sebagai berikut :

- a. Mengembangkan dan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) perencana.
- b. Meningkatkan keselarasan perencanaan pembangunan berbasis teknologi informasi.
- c. Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan.

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan janji Rencana Kerja Tahunan yang sangat penting dilakukan oleh pimpinan Instansi lingkungan pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang akan diberikan atau dihasilkan. Dengan adanya perjanjian kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan menjadi lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Perjanjian Kinerja Bappeda Kota Banjarbaru mengacu pada Renstra Bappeda Tahun 2016-2021, Rencana Kerja Bappeda Tahun 2017 dan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Tahun 2017. Bappeda Kota Banjarbaru telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 2.2  
Program dan Anggaran Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2017

No	Sasaran	Program Kegiatan	Target	Anggaran Th.2017
1	Mewujudkan keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		305.408.500
		Penyusunan Rancangan RKPD	100%	129.090.000
		Penetapan RKPD	100%	24.895.500
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	100%	140.647.000



No	Sasaran	Program Kegiatan	Target	Anggaran Th.2017
		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi		
		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi		10.776.000
		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	100%	10.776.000
		Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya		285.835.000
		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya	100%	43.620.000
		Pembinaan Program Kemiskinan	100%	242.215.000
		Program Pembangunan Prasarana Wilayah dan SDA		28.744.400
		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana wilayah dan SDA	100%	13.215.400
		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	100%	15.529.000
2	Terakomodirnya aspirasi Masyarakat dalam Pembangunan daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		471.828.500
		Pelaksanaan Musrenbang RKPD	80%	195.769.000
		Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	100%	94.273.500
		Penyusunan dan Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Daerah	80%	110.250.000
		Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Walikota	80%	71.536.000
		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sosial Budaya		19.200.000
		Monitoring dan Evaluasi Bidang Ekonomi	100%	6.750.000
		Monitoring dn Evaluasi Bidang Sosial Budaya	100%	12.450.000
		Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Air		8.412.000

No	Sasaran	Program Kegiatan	Target	Anggaran Th.2017
		Monitoring , Evaluasi Bidang Fispra	100%	8.412.000
3	Meningkatnya Dok.Perencanaan Sektoral dan Kewilayahan yg memenuhi aspek kualitas pelaksanaan perencanaan	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA		2.453.572.350
		Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	100%	536.078.850
		Penyusunan Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Air	100%	1.917.493.500
4	Meningkatnya Dokumen hasil kajian/penelitian untuk menjadi bahan kebijakan pembangunan	Program pengembangan dan Penelitian		236.460.400
		Diseminasi hasil penelitian	1 Kali	27.318.400
		Jaringan Penelitian	1 Kali	10.750.000
		Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi dan Pemerintahan	2 Dokumen	163.767.000
		Penelitian dan Pengembangan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi	2 Dokumen	34.625.000
5	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja SKPD	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		28.065.000
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	15.250.000
		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	1 Dokumen	12.815.000

Sumber : Data diolah, Bappeda Tahun 2017

BAB III

AKUNTABILITAS



Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi atas penggunaan anggaran, dalam penyusunan laporan kinerja hal yang utama adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (permenpan 53 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Sumber : Data diolah, Permen dagri 86 Tahun 2017

3.1 Capaian

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91 ≤	Sangat Tinggi	
2	76 ≤ 90	Tinggi	
3	66 ≤ 75	Sedang	
4	51 ≤ 65	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Indikator Kinerja Utama Th.2017

Bappeda Kota Banjarbaru menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), dan dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja telah dilakukan evaluasi triwulan kinerja. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Banjarbaru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2  
Capaian IKU Bappeda Tahun 2017

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2016	Capaian 2017			Sesuai Target	Klasifikasi
				Target	Realisasi	Prosentase		
1	Mewujudkan keselarasan perencanaan	Tingkat Keselarasan RKPD dengan RPJMD	100%	100%	100%	100%	Sesuai Target	Sangat Tinggi
		Tingkat Keselarasan Renstra SKPD dengan RPJMD		100%	100%	100%	Sesuai Target	Sangat Tinggi
		Tingkat keselarasan Renja SKPD dengan RKPD		100%	100%	100%	Sesuai Target	Sangat Tinggi
2	Terakomodirnya aspirasi masyarakat	Prosentase belanja langsung RKPD yang mengakomodir usulan Musrenbang	100%	100%	100%	100%	Sesuai Target	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Dokumen	Prosentase Dokumen	100%	100%	100%	100%	Sesuai Target	Sangat Tinggi

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2016	Capaian 2017			Sesuai Target	Klasifikasi
				Target	Realisasi	Prosentase		
	perencanaan Sektoral dan Kewilayahan yang memenuhi Aspek Kualitas	perencanaan Sektoral dan Kewilayahan yang memenuhi Aspek Kualitas						
4	Meningkatnya hasil kajian/penelitian untuk bahan kebijakan pembangunan	Prosentase kajian/penelitian dan pengembangan yang diaplikasikan pada kebijakan pemerintah Kota Banjarbaru	100%	100%	100%	100%	Sesuai Target	Sangat Tinggi
5	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja SKPD	Prosentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	Sesuai Target	Sangat Tinggi
		Nilai Evaluasi LAKIP	C	CC	B	100%	Sesuai target	Sangat Tinggi

Sumber : Data diolah, Bappeda Tahun 2017

Berdasarkan tabel 3.2 diatas terdapat 5 (lima) sasaran strategis yang terbagi ke dalam

8 (delapan) indikator sasaran strategis. Dalam hal ini indikator sasaran strategis tersebut menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kota Banjarbaru. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dilakukan perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

**Sasaran Startegis 1** : pada sasaran Mewujudkan keselarasan perencanaan, ditargetkan bahwa tingkat keselarasan dokumen Pembangunan RPJMD, Resntra SKPD dan RKPD sudah selaras seluruhnya atau 100%. Berdasarkan hasil evaluasi ketiga dokumen perencanaan tersebut, maka capaian keselarasan pada tahun 2017 mencapai 100% atau sesuai dengan target. Hal itu dapat diwujudkan, karena dalam proses penyusunan dokumen renstra SKPD dan RKPD selalu mengacu pada RPJMD tahun 2016 – 2021 yang telah disusun pada awal masa pemerintahan Walikota Banjarbaru 2016-2021.

Untuk mempertahankan capaian serta meningkatkan kualitas dokumen perencanaan diperlukan upaya peningkatan sistem perencanaan pemmbangunan daerah berbasis Teknologi Informasi dan peningkatan kapasaitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan. Dokumen-dokumen yang sudah dihasilkan, yaitu :

Tabel 3.1  
Dokumen yang dihasilkan

No	DOKUMEN	TAHUN
----	---------	-------



		2016	2017
1	RKPD/RKPD-P	√	√
2	KUA PPAS / KUA-P PPAS	√	√
3	RKT		√
4	LKPJ Walikota Banjarbaru	√	√
5	Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Kota Banjarbaru		√

**Sasaran Strategis 2 :** pada sasaran Terakomodirnya aspirasi masyarakat, perencanaan pembnagunan akan menjadi lebih efektif pelaksanaannya apabila melibatkan peran serta aktif masyarakat dalam penentuan identifikasi dan penentuan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan. Dalam hal ini, aspirasi masyarakat telah diakomodir dan ditargetkan 100% atau target di tahun 2017 telah tercapai.

Dalam mempertahankan capaian serta meningkatkan lagi aspirasi masyarkat, maka sangat diperlukan koordinasi yang lebih intensif lagi pada saat pelaksanaan musrenbang dari tingkat kelurahan dan pada saat pelaksanaan monitoring dilapangan. Sehingga aspirasi dan pelaksaasn pembangunan dapat tepat sasaran.

**Sasaran Strategis 3 :** pada sasaran Meningkatnya Dokumen perencanaan Sektorl dan Kewilayahan yang memenuhi Aspek Kualitas, untuk mendukung pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerah diperlukan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sektoral dan keliwalayahan yang berkualitas (dapat diterapkan degan kondisi daerah).

Ditarget pada tahun 2017 bahwa dok perencnaann yg mmenuhi aspek kualitas sbesar 100% dan berhasil dicapai. Hal itu dapat dicapai karena dalam proses penyusunan perncanaan selalu melibatkan pihak-pihak yang kompeten pada bidang-bidang yang direncanakan. Dokumen-dokumen yang dihasilkan sebagai berikut :

Tabel 3.2  
Dokumen yang telah dihasilkan

No	DOKUMEN	TAHUN	
		2016	2017
1	Penyusunan Database Pemanfaatan dan Penggunaaan Lahan Kel.Komet	√	
2	Penyusunan Database Pemanfaatan dan Penggunaan Lahan Kel. Loktabay Utara, Kel. Mentaos dan Kel.Sungai Ulin	√	
3	Penyusunan Database Pemanfaatan dan Penggunaaan Lahan Kec. Banjarbaru Selatan		√
4	Penyusunan Database Pemanfaatan dan Penggunaaan Lahan Kec. Landasan Ulin		√
5	Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Kota Banjarbaru	√	
6	Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Startegis	√	
7	Dokumen Review Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM)	√	



No	DOKUMEN	TAHUN	
		2016	2017
8	Review Dokumen Strategi Sanitasi Kota	√	
9	Dokumen Analisis Perkembangan Perumahan Kota Banjarbaru	√	
10	Dokumen Review Rencana Program Insfratraktur Jangka Menengah (RPIJM) Kota Banjarbaru		√
11	Dokumen Review Perencanaan Teknis Umum Rencana Induk Jaringan Jalan Kota Banjarbaru		√
12	Dokumen Database Infrastruktur Kota Banjarbaru		√
13	Kajian Perekonomian Kota Banjarbaru	√	
14	Profil Ekonomi Kota Banjarbaru	√	√
15	Rencana Induk Pembangunan Industri Kota Banjarbaru	√	
16	Analisis Potensi Ekonomi Kota Banjarbaru		√
17	Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Kota Banjarbaru		√
18	Penyusunan Rencana Spasial Bid.Pendidikan dan Kesehatan		√
19	Profil dan Analisis Gender		√
20	Profil dan Analisis Sosial Budaya		√
21	Analisis IPM Kota Banjarbaru	√	
22	Analisis Bidang Pendidikan	√	
23	Analisis Bidang Kesehatan	√	

**Sasaran Strategis 4** : pada sasaran meningkatnya hasil kajian/penelitian untuk bahan kebijakan pembangunan, dalam menyikapi berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi maka pemerintah daerah perlu melakukan beberapa kajian atau penelitian yang akan merekomendasikan kebijakan bagi pemerintah daerah. Pada tahun 2107 penelitian/kajian selalu melibatkan pihak-pihak yang kompeten. Prosentase kajian/penelitian dan pengembangan yang diaplikasikan pada Pemerintah Kota Banjarbaru ditargetkan sebsar 100% dan target itu berhasil dicapai melalui (dua) kajian. Untuk meningkatkan kualitas hasil kajian penelitian pada tahun kedepan sangat diperlukan kapasitas sumber daya manusia penelitian dan pengembangan daerah. Dokumen yang telah dihasilkan :

Tabel 3.3  
Dokumen yang telah dihasilkan

No	DOKUMEN	TAHUN
----	---------	-------



		2016	2017
1	Kajian Keberadaan Pasar lokal ditengah pertumbuhan pusat perbelanjaan dan toko modern di Kota Banjarbaru	√	
2	Implementasi Kebijakan Pendidikan Karakter berbasis pembiasaan di Kota Banjarbaru	√	
3	Evaluasi Kinerja Pelayanan Persampahan di Kota Banjarbaru		√
4	Analisis Relokasi pemindahan pasar beruntung ke stadion mini gawi seberataan Kota Banjarbaru		√

**Sasaran Strategis 5** : pada sasaran Peningkatan Akuntabilitas Kinerja SKPD, upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD digambarkan melalui indikator prosentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti dan nilai evaluasi LAKIP. Untuk indikator temuan BPK /Inspektorat yang ditindaklanjuti pada tahun 2017 sebesar 100% dan dapat dicapai. Pada tahun 2017 ditemukan 4 (empat) temuan oleh inspektorat yg perlu ditindaklanjuti oleh Bappeda Kota Banjarbaru dan semua telah ditindaklanjuti oleh Bappeda.

Sedangkan nilai evaluasi lakip ditarget menjadi CC dari semula dinilai C pada tahun 2016 dan realisasinya nilai lakip bappeda tahun 2017 mendapatkn nilai B artinya berhasil melampaui target. Untuk peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang administrasi tentang keuangan daerah maka perlu koordinasi dan konsultasi intensif dengan instasi-instansi terkait seperti BPK dan inspektorat.

Berdasarkan uraian diatas, maka indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Dalam hubungan ini, penetapan indikator kinerja kegiatan merupakan proses identifikasi, pengembangan, dan konsultasi bahwa indikator kinerja atau ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan kegiatan dan program-program instansi.

Hasil pelaksanaan program kegiatan Tahun 2017, jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam RKPD menunjukan bahwa ketujuh indikator kunci telah terealisasi 100%. Berdasarkan skala nilai peringkat kerja seperti tabel 3.1, maka kinerja Bappeda Kota Banjarbaru Tahun 2017 berada pada klasifikasi **Sangat Tinggi**.

Keberhasilan pencapaian kinerja dengan klasifikasi sangat tinggi ini dikarenakan seluruh pelaksana kegiatan melaksanakan seluruh kegiatan dengan tertib anggaran dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Selain itu, terdapat konsistensi RKPD Bappeda dengan RPJMD Kota Banjarbaru, yang didukung oleh koordinasi dan kerjasama yang baik dari seluruh *stakeholder* internal Bappeda.

3.2 Akuntabilitas Keuangan



Bappeda Kota Banjarbaru pada tahun anggaran 2017 memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 9.997.381.167,- (sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu seratus enam puluh tujuh rupiah). Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 3.274.294.000,- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dan Belanja Langsung sebesarRp 6.723.087.167,- (enam milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta delapan puluh tujuh ribu seratus enam puluh tujuh rupiah).

Struktur Anggaran Belanja tersebut terdiri dari:

1. Belanja Langsung Urusan SKPD sebesar Rp 2.421.269.217,- (dua milyar empat ratus dua puluh satu juta dua ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tujuh belas rupiah), yang di jabarkan ke dalam 3 (tiga) program dan 23 kegiatan.
2. Belanja Langsung Urusan Perencanaan dialokasikan anggaran sebesar Rp 4.063.196.750,- (empat milyar enam puluh tiga juta seratus sembilan puluh enam ribu stujuh ratus lima puluh rupiah) yang dijabarkan kedalam 4 (empat) Program dan 20 (dua puluh) kegiatan.
3. Belanja Langsung Urusan Penelitian dan Pengembangan di alokasikan sebesar Rp 238.621.200,- (dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah) yang dijabarkan ke dalam 2 (dua) program dan 5 (lima) kegiatan.

Dari alokasi tersebut, terealisasi sebesar Rp 8.925.596.000,- (delapan milyar sembilan ratus dua puluh lima juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) atau 89.28%. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan realisasi pencapaian target kinerja setiap sasaran pada Bappeda Kota Banjarbaru tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3  
Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2017

No	sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Program/ Kegiatan	Anggaran Th.2017		Capaian	
						Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (%)	Fisik (%)
1	Mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan Daerah	1. Tingkat Keselara san RKPD dengan RPJMD  2. Tingkat Keselara san Renstra SKPD dengan RPJMD  3. Tingkat Keselarasan Renja SKPD dengan RKPD	100 %	100%	Penyusunan Rancangan RKPD	129.090.000	89.014.000	68,95	100



No	sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Program/ Kegiatan	Anggaran Th.2017		Capaian	
						Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (%)	Fisik (%)
					Penetapan RKPD	24.895.500	21.685.500	87,11	100
					Monitorin, evaluasi, pengendali an dan pelaporan pelaksanaa n rencana pembangun an daerah	94.273.500	84.099.500	89,21	100
					Penyusu nan Dokumen Perenca naan Daerah	140.647.000	75.187.000	53,46	100
					Penyusu nan dan Pengelo laan Sistem Informasi Perenca naan, Monitoring dan Evaluasi Daerah	110.250.000	109.475.000	99,30	100
					Koordinasi Penyusu nan Laporan Keterangan Pertang gung Jawaban Walikota	71.536.000	60.740.000	86,03	100
					Koordinasi Perenca naan Pembangun an Bidang Ekonomi	10.776.000	9.649.950	89,55	100
					Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	6.750.000	6.252.200	92,63	100
					Koordinasi Perenca naan Pembangun an Sosial dan budaya	43.620.000	15.220.000	34,89	100
					Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan	12.450.000	8.490.000	68,19	100
					Monitoring , evaluasi dan pelaporan	8.412.000	8.371.700	99,52	100
					Koordinasi Perenca naan Pembangun an Pemukiman dan Lingkung an Hidup	15.529.000	15.455.700	99,53	100
					Koordinasi Perenca naan Pembangun an Prasarana wilayah	13.215.400	12.075.400	91,37	100

No	sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Program/ Kegiatan	Anggaran Th.2017		Capaian	
						Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (%)	Fisik (%)
					dan SDA				
2.	Terakomodirnya aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah	4. Persentase Belanja Langsung RKPD yang menga komodir Usulan Musren bang	100%	100%	Pelaksanaan Musren bang RKPD	195.769.000	162.240.000	82,87	100
3.	Meningkatnya dokumen Perencanaan Sektoral dan kewilayahan yang memenuhi aspek kualitas pelaksanaan perencanaan	5. Prosentase Dokumen Perencanaan Sektoral dan Kewilayahan yang memnuhi aspek kualitas	100%	100%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah	223.347.000	175.192.800	78,44	100
					Pembinaan Program Kemiskinan	242.215.000	212.800.000	87,86	100
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya	173.430.600	165.750.600	95,57	100
					Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	536.078.850	532.249.850	99,29	100
					Penyusunan Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Air	1.917.493.500	1.897.753.500	98,97	100
4	Meningkatnya dokumen hasil kajian/pe nelitian untuk menjadi bahan kebijakan pembangun	6. Persentase kajian/pe nelitian dan pengem bangan yang diaplikasika n pada kebijakan pemerin tah Kota Banjarbaru	100%	100%	Program pengem bangan dan Penelitian	236.460.400	198.645.200	84,01	100
					Diseminasi hasil penelitian	27.318.400	14.373.200	52,61	100
					Jaringan Penelitian	10.750.000	5.234.000	48,69	100
					Penelitian dan Pengem bangan Sosial Ekonomi dan Pemerintah an	163.767.000	152.560.000	93,16	100
					Penelitian dan Pengem bangan Pembangunan, inovasi	34.625.000	26.478.000	76,47	100





No	sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Program/ Kegiatan	Anggaran Th.2017		Capaian	
						Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (%)	Fisik (%)
					dan Teknologi				
5	Peningkatan akuntabilitas kinerja SKPD	7. Nilai Evaluasi Lakip	CC	B	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.250.000	15.250.000	100	100
		8. Presentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	100%	100%	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	12.815.000	12.799.000	99,88	100

Sumber : Data diolah, Bappeda Tahun 2017

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk mencapai sasaran SKPD. Sedangkan tidak terealisasinya sebagian anggaran disebabkan oleh adanya efisiensi belanja akibat dari proses pengadaan barang dan jasa, serta kebijakan-kebijakan daerah yang harus disesuaikan.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

Pada tahun anggaran 2017, Bappeda Kota Banjarbaru memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 9.997.381.167,- (sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu seratus enam puluh tujuh rupiah). Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 3.274.294.000,- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dan Belanja Langsung sebesar Rp 6.723.087.167,- (enam milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta delapan puluh tujuh ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 8.925.596.000,- (delapan milyar sembilan ratus dua puluh lima juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) atau 89.28%.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan Tahun 2017, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Delapan indikator kunci yang menjadi indikator kinerja Bappeda Kota Banjarbaru, seluruhnya telah terealisasi 100% dengan klasifikasi **Sangat Tinggi**.
- b. 11 (Sebelas) program dan 47 (empat puluh tujuh) kegiatan telah dilaksanakan tertib anggaran dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
- c. Realisasi anggaran sebesar 89.28% terjadi karena adanya efisiensi belanja akibat dari proses pengadaan barang dan jasa, serta kebijakan-kebijakan daerah yang harus disesuaikan.

#### 2. Saran

- a. Bappeda Kota Banjarbaru agar dapat mempertahankan bahkan meningkatkan capaian kinerja terutama dari sisi kualitas.
- b. Dalam lebih meningkatkan kinerja Bappeda, maka diperlukan upaya peningkatan kapasitas SDM melalui kursus, diklat dan bimtek yang dibutuhkan sesuai dengan kompetensinya.